



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR : /Kep.Bup/KOMINFO/2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

- 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5038);
  6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Republik Indoneia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupeten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Komisi Informasi Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 7);

17. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika di Lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ( Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan struktur dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
- c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- d. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- e. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasika;
- g. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- h. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- i. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
- j. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

KETIGA : Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:  
a. menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;

- b. menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
- c. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- d. meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- e. menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
- f. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID;
- g. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- h. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

KEEMPAT : Atasan PPID mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menunjuk PPID dan PPID Pelaksana;
- b. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik;
- c. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
- d. mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
- e. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana.

KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
- b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
- c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;

- e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

KEENAM : Tim Pertimbangan bertanggungjawab membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

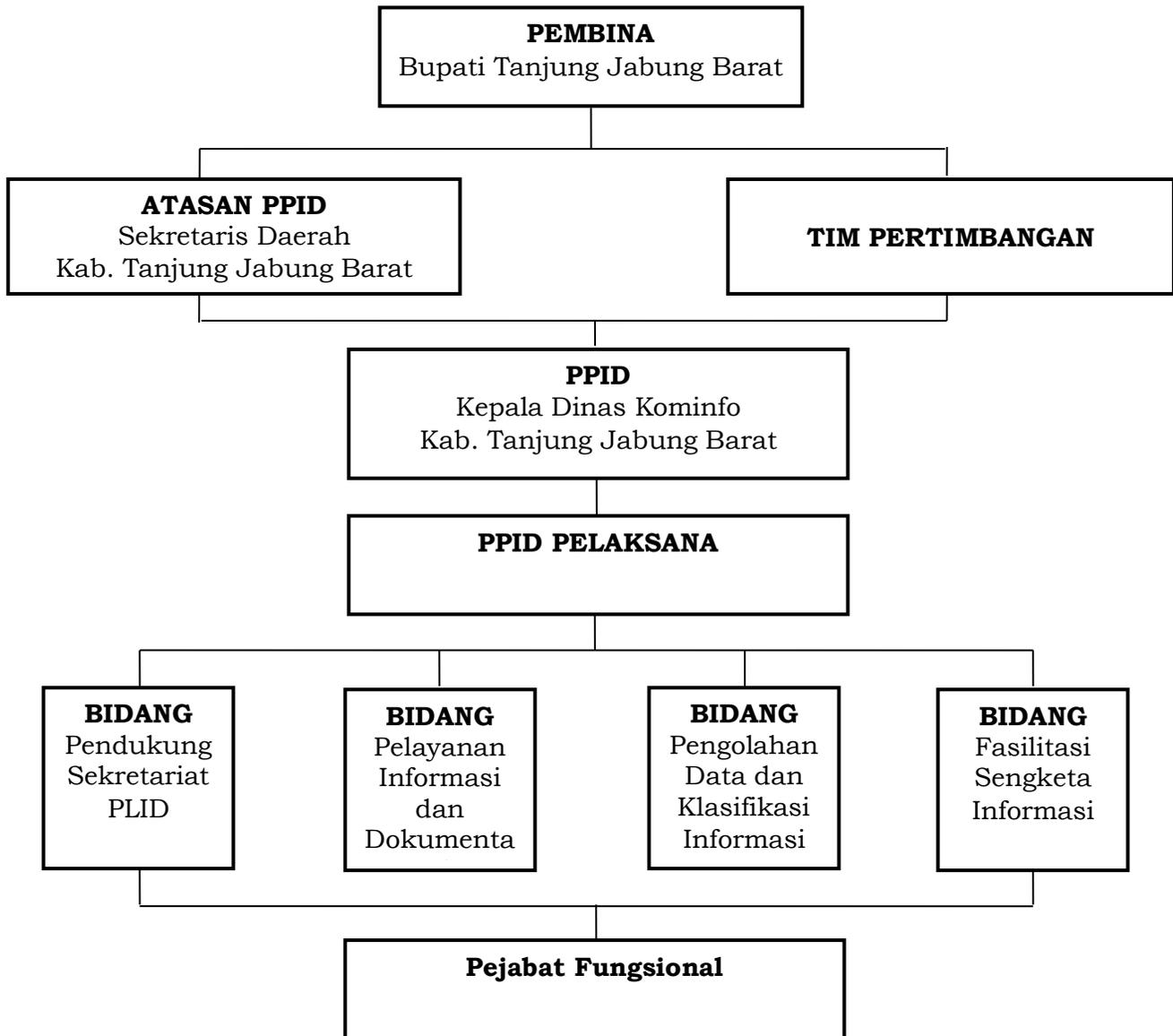
Ditetapkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ANWAR SADAT

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR : /Kep.Bup/KOMINFO/2023  
TENTANG  
PENETEPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG BARAT

BAGAN STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ANWAR SADAT

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR : /Kep.Bup/KOMINFO/2023  
TENTANG  
PENETEPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG BARAT

SUSUNAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- a. Pembina : Bupati Tanjung Jabung Barat
- b. Atasan PPID : Sekretaris Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat
- c. Tim Pertimbangan : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Tanjab Barat  
2. Inspektur Kab. Tanjung Jabung Barat  
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Tanjung Jabung Barat
- d. PPID : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat
- e. PPID Pelaksana : 1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Tanjab Barat  
2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Tanjab Barat  
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Tanjab Barat  
4. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Tanjab Barat  
5. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setda Kab. Tanjab Barat  
6. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kab. Tanjab Barat  
7. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Tanjab Barat  
8. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Tanjab Barat  
9. Kepala Bagian Umum Kab. Tanjab Barat  
10. Kepala Bagian Kerja Sama Setda Kab. Tanjab Barat  
11. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Tanjab Barat  
12. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kab. Tanjab Barat  
13. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Tanjab Barat  
14. Sekretaris Inspektorat Kab. Tanjab Barat  
15. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanjab Barat  
16. Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Tanjab Barat  
17. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Tanjab Barat  
18. Sekretaris Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjab Barat

19. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Tanjab Barat
20. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjab Barat
21. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanjab Barat
22. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tanjab Barat
23. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Tanjab Barat
24. Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tanjab Barat
25. Sekretaris Dinas Sosial Kab. Tanjab Barat
26. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kab. Tanjab Barat
27. Sekretaris Dinas Perhubungan Kab. Tanjab Barat
28. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjab Barat
29. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjab Barat
30. Sekretariats Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanjab Barat
31. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tanjab Barat
32. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanjab Barat
33. Sekretaris Dinas Pariwisata , Kepemudaan dan Olah Raga Kab. Tanjab Barat
34. Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Holtikutura Kab. Tanjab Barat
35. Sekretaris Dinas Perikanan Kab. Tanjab Barat
36. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjab Barat
37. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Tanjab Barat
38. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tanjab Barat
39. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kab. Tanjab Barat
40. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kab. Tanjab Barat
41. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tanjab Barat
42. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanjab Barat
43. Sekretaris Kecamatan Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat

44. Sekretaris Kecamatan Tungkal Ulu Kab. Tanjab Barat
45. Sekretaris Kecamatan Batang Asam Kab. Tanjab Barat
46. Sekretaris Kecamatan Betara Kab. Tanjab Barat
47. Sekteraris Kecamatan Bram Itam Kab. Tanjab Barat
48. Sekretaris Kecamatan Kuala Betara Kab. Tanjab Barat
49. Sekretaris Kecamatan Merlung Kab. Tanjab Barat
50. Sekretaris Kecamatan Muara Papalik Kab. Tanjab Barat
51. Sekretaris Kecamatan Pengabuan Kab. Tanjab Barat
52. Sekretaris Kecamatan Renah Mendaluh Kab. Tanjab Barat
53. Sekretaris Kecamatan Seberang Kota Kab. Tanjab Barat
54. Sekretaris Kecamatan Senyerang Kab. Tanjab Barat
55. Sekretaris Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat
56. Sekretaris Kelurahan Tungkal I Kec. Tungkal Ilir
57. Sekretaris Kelurahan Tungkal II Kec. Tungkal Ilir
58. Sekretaris Kelurahan Tungkal III Kec. Tungkal Ilir
59. Sekretaris Kelurahan Tungkal IV Kota Kec. Tungkal Ilir
60. Sekretaris Kelurahan Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir
61. Sekretaris Kelurahan Kampung Nelayan Kec. Tungkal Ilir
62. Sekretaris Kelurahan Patunas Kec. Tungkal Ilir
63. Sekretaris Kelurahan Sriwijaya Kec. Tungkal Ilir
64. Sekretaris Kelurahan Sungai Nibung Kec. Tungkal Ilir
65. Sekretaris Kelurahan Pelabuhan Dagang Kec. Tungkal Ulu
66. Sekretaris Kelurahan Tebing Tinggi Kec. Tebing Tinggi
67. Sekretaris Kelurahan Dusun Kebun Kec. Batang Asam
68. Sekretaris Kelurahan Lubuk Kambing Kec. Renah Mendaluh
69. Sekretaris Kelurahan Merlung Kec. Merlung
70. Sekretaris Kelurahan Rantau Badak Kec. Muara Papalik
71. Sekretaris Kelurahan Senyerang Kec. Senyerang
72. Sekretaris Kelurahan Mekar Jaya Kec. Betara

73. Sekretaris Kelurahan Betara Kiri Kec. Kuala Betara
  74. Sekretaris Kelurahan Teluk Nilau Kec. Pengabuan
  75. Sekretaris Kelurahan Bram Itam Kiri Kec. Bram Itam
  76. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pengabuan Kab. Tanjab Barat
  77. Direktur Perusahaan Daerah BPR Tanggo Rajo Kab. Tanjab Barat
  78. Direktur BUMD Jabung Sakti Kab. Tanjab Barat
- f. Bidang Pendukung Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi : 1. Kepala Bidang Layanan E-Government Dinas Kominfo Kab. Tanjab Barat  
2. Pranata Humas Ahli Muda Dinas Kominfo Kab. Tanjab Barat  
3. Staf Bidang Pengelolaan Informasi dan Opini Publik Dinas Kominfo Kab. Tanjab Barat
- g. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi : 1. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Opini Publik Dinas Kominfo Kab. Tanjab Barat  
2. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kominfo Kab. Tanjab Barat
- h. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : 1. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kab. Tanjab Barat  
2. Pranata Humas Ahli Muda Dinas Kominfo Kab. Tanjab Barat
- i. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi : 1. Kepala Bidang TIK dan Persandian Dinas Kominfo Kab. Tanjab Barat  
2. Pranata Humas Ahli Muda Dinas Kominfo Kab. Tanjab Barat

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ANWAR SADAT